



Mengungkap Kompleksitas Strategi Investasi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Syarifaatul Hidayah¹, Nia Malvin Faradila²

^{1,2} Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 09 Juni 2024

Revised: 16 Juni 2024

Accepted: 23 Juni 2024

Capital investment in the city of Semarang shows the complexity in administrative burdens that affect investment. This study conducted a qualitative analysis of the administrative burden in the investment process, highlighting factors such as complicated licensing processes, lack of coordination between agencies, policies that have not been implemented properly, and public understanding of licensing procedures. The in-depth interview method was used to gain a holistic understanding of business actors who have invested capital in Semarang City. The results show that the burden of time, energy, and costs are the main obstacles, emphasizing the need for coordinated efforts from local governments, related agencies, and the community in reducing administrative complexity. Simplifying the licensing process, improving coordination, implementing more effective policies, and educating the public are key steps in creating a conducive investment environment. Semarang City, Capital Investment, Administrative Expenses, Qualitative Analysis, Licensing Process, Inter-Agency Coordination, Government Policy, Public Education

Keywords:

(*) Corresponding Author:

hidayahsari109@gmail.com

How to Cite: Hidayah, S., & Faradila, N. M. (2024). Mengungkap Kompleksitas Strategi Investasi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12588611>

PENDAHULUAN

Penanaman modal bukan sekadar penggerak ekonomi, tetapi juga cerminan dari perkembangan sebuah kota. Bagi pemerintah daerah, menciptakan lingkungan yang mengundang bagi investor adalah hal yang sangat penting. Salah satu tantangan utama dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif adalah mengurangi beban administrasi yang kerap menjadi rintangan utama bagi para investor.

Pengurangan beban administrasi menjadi langkah kunci dalam membuka pintu bagi investasi yang lebih besar dan beragam. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu seringkali menjadi penghalang utama bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan efisiensi administrasi, dan meminimalisir birokrasi yang berlebihan menjadi prioritas bagi pemerintah daerah guna menciptakan iklim investasi yang ramah dan menarik bagi para pelaku bisnis.

Beban administrasi dalam penanaman modal memunculkan sejumlah biaya yang menjadi tanggungan para investor. Biaya tersebut meliputi investasi waktu yang cukup signifikan, upaya tenaga, serta segala biaya terkait yang diperlukan untuk menyelesaikan proses perizinan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.



Tingkat beban administrasi yang tinggi ini sering menjadi batu sandungan utama bagi para investor dalam mengalokasikan modal mereka.

Para investor harus menyisihkan waktu yang berharga untuk mengurus proses perizinan yang terkadang memakan waktu berbulan-bulan. Selain itu, upaya yang signifikan dari segi tenaga juga diperlukan untuk memenuhi beragam persyaratan yang diberlakukan, mulai dari pengurusan dokumen hingga pemenuhan berbagai keharusan administratif lainnya. Biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh para investor untuk memenuhi persyaratan ini dapat memberi dampak signifikan pada keseluruhan modal yang mereka investasikan.

Tingginya beban administrasi dalam penanaman modal tidak hanya memengaruhi aspek waktu dan tenaga, tetapi juga menghasilkan berbagai biaya tambahan yang tidak terduga. Para investor sering kali menghadapi biaya-biaya seperti biaya pengurusan izin, biaya legalisir dokumen, dan sejumlah biaya administratif lainnya. Selain menambahkan beban keuangan, biaya-biaya ini juga bisa merugikan alokasi modal yang seharusnya digunakan untuk pengembangan proyek atau investasi lainnya.

Kota Semarang, sebagai salah satu kota yang memiliki potensi besar dalam menarik investasi, juga menghadapi tantangan serupa. Masih ada sejumlah hambatan yang dihadapi oleh para investor saat berusaha menanamkan modalnya di kota ini, dan salah satu hambatan yang signifikan adalah beban administrasi yang cukup tinggi.

Beban administrasi dalam penanaman modal memunculkan sejumlah biaya yang menjadi tanggungan para investor. Biaya tersebut meliputi investasi waktu yang cukup signifikan, upaya tenaga, serta segala biaya terkait yang diperlukan untuk menyelesaikan proses perizinan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tingkat beban administrasi yang tinggi ini sering menjadi batu sandungan utama bagi para investor dalam mengalokasikan modal mereka.

Para investor harus menyisihkan waktu yang berharga untuk mengurus proses perizinan yang terkadang memakan waktu berbulan-bulan. Selain itu, upaya yang signifikan dari segi tenaga juga diperlukan untuk memenuhi beragam persyaratan yang diberlakukan, mulai dari pengurusan dokumen hingga pemenuhan berbagai keharusan administratif lainnya. Biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh para investor untuk memenuhi persyaratan ini dapat memberi dampak signifikan pada keseluruhan modal yang mereka investasikan.

Tingginya beban administrasi dalam penanaman modal tidak hanya memengaruhi aspek waktu dan tenaga, tetapi juga menghasilkan berbagai biaya tambahan yang tidak terduga. Para investor sering kali menghadapi biaya-biaya seperti biaya pengurusan izin, biaya legalisir dokumen, dan sejumlah biaya administratif lainnya. Selain menambahkan beban keuangan, biaya-biaya ini juga bisa merugikan alokasi modal yang seharusnya digunakan untuk pengembangan proyek atau investasi lainnya.

METODE

Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, biasanya melalui pengumpulan data deskriptif, observasi, dan analisis naratif. Berbeda dengan

metode kuantitatif yang mengutamakan pengukuran dan statistik, metode kualitatif menekankan pada interpretasi subjektif, konteks, dan kompleksitas dalam memahami suatu masalah. Metode ini menggunakan teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis konten untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang persepsi, sikap, dan motivasi individu atau kelompok terkait topik penelitian. Dengan menekankan pada konteks dan penafsiran makna, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek kompleks dari suatu fenomena, memberikan gambaran yang lebih komprehensif serta memungkinkan penemuan-penemuan baru yang mungkin tidak terukur secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Investasi di Dinas Penanaman Modal Kota Semarang

Dalam konteks penanaman modal di Kota Semarang, beban administrasi bukan sekadar hambatan tetapi menjadi faktor sentral yang mengatur dinamika investasi di wilayah tersebut. Peran pemerintah daerah sangat signifikan dalam menciptakan kebijakan dan aturan yang mengatur sektor penanaman modal. Ini mencakup aspek pemerintahan daerah, kebijakan akuntansi, serta perencanaan pembangunan jangka pendek yang berperan dalam mengarahkan aliran investasi. Peran walikota yang menerbitkan izin investasi dan memberikan dukungan akses permodalan bagi para pengusaha merupakan aspek kunci dalam membuka peluang investasi di Kota Semarang. Selain itu, adanya Kampung Tematik yang menggambarkan identitas dan potensi lokal juga menimbulkan beban administratif yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaannya.

Perencanaan jangka pendek menjadi elemen krusial dalam menentukan prioritas sektor pembangunan dan pengaturan tata ruang yang mampu mengakomodasi karakteristik wilayah. Pengendalian modal juga menjadi faktor penting yang mencakup pengawasan terhadap keberhasilan proyek serta pengendalian perencanaan dan kebijakan akuntansi. Keseluruhan aspek ini menunjukkan kompleksitas dari beban administratif yang membutuhkan manajemen yang baik dari pemerintah daerah, walikota, dan kelurahan guna menjamin pertumbuhan investasi yang berkelanjutan di Kota Semarang.

Integrasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, walikota, dan kelurahan menjadi krusial dalam menangani kompleksitas beban administratif. Peran pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan dan aturan yang mengatur sektor penanaman modal perlu diselaraskan dengan peran walikota yang menerbitkan izin investasi dan mendukung akses permodalan bagi pengusaha. Selain itu, kelurahan memegang peran penting dalam mengelola aspek lokal yang mempengaruhi investasi pada tingkat komunitas. Keseluruhan entitas ini harus bekerja bersama-sama untuk memastikan investasi di Kota Semarang dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Mengingat kompleksitasnya, penanganan beban administrasi dalam penanaman modal di Kota Semarang memerlukan pendekatan yang komprehensif. Upaya untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta memperbaiki kebijakan dan operasional perusahaan menjadi

langkah utama dalam mengatasi tantangan administratif. Kolaborasi antara pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, menjadi krusial dalam merespons tantangan ini. Dengan langkah-langkah konkret dan sinergi antarinstansi, diharapkan dapat diciptakan lingkungan investasi yang lebih ramah dan efisien di Kota Semarang.

Penanganan beban administrasi dalam konteks penanaman modal tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif walikota dan kelurahan. Harmonisasi kebijakan serta regulasi yang bersifat inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan investasi menjadi kunci utama dalam meminimalisir hambatan administratif. Integrasi antara perencanaan jangka pendek dengan kebijakan akuntansi yang efektif akan memastikan arah investasi yang berkesinambungan dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek investasi serta pengendalian perencanaan dan kebijakan akuntansi akan mendukung terciptanya lingkungan investasi yang lebih terstruktur dan efisien.

Dalam konteks penanaman modal di Kota Semarang, efisiensi dalam mengelola beban administrasi adalah fondasi utama untuk menciptakan lingkungan investasi yang memadai. Keberhasilan dalam manajemen berbagai aspek administratif tersebut menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kota sebagai destinasi investasi yang menarik. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah daerah, walikota, dan kelurahan memainkan peran vital dalam mengatasi hambatan administratif yang ada.

Pemerintah daerah, sebagai pengatur kebijakan dan regulasi, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan efisiensi proses penanaman modal. Walikota, dengan kewenangannya dalam menerbitkan izin investasi, turut berperan dalam menciptakan kondisi yang ramah bagi para investor. Kelurahan juga memegang peranan dalam mengelola aspek lokal yang mempengaruhi investasi di tingkat komunitas. Integrasi peran dan koordinasi antara ketiga entitas ini diperlukan untuk memastikan bahwa investasi di Kota Semarang dapat berlangsung secara lancar dan efisien.

Harmonisasi kerja bersama dari pemerintah daerah, walikota, dan kelurahan menjadi krusial dalam merancang langkah-langkah yang dapat mengatasi hambatan administratif. Koordinasi yang baik antara entitas pemerintah ini akan membuka jalan bagi proses perizinan yang lebih efisien dan transparan bagi para investor. Dengan demikian, mereka dapat merencanakan dan melaksanakan investasi mereka dengan lebih percaya diri, sehingga menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik dan kondusif di Kota Semarang.

Dalam proses penanaman modal di Kota Semarang menggambarkan tantangan yang signifikan bagi para investor. Beban waktu yang memakan waktu berbulan-bulan untuk pengurusan izin, beban tenaga yang tinggi karena banyaknya dokumen dan persyaratan, serta beban biaya yang mencakup biaya pengurusan izin dan legalisasi dokumen, semuanya menyulitkan proses investasi. Hal ini secara keseluruhan menciptakan hambatan yang mungkin mempengaruhi minat para investor untuk menanamkan modalnya di kota ini.

Beberapa faktor mendasar yang memperburuk beban administrasi termasuk keterpecahan kewenangan di antara berbagai instansi pemerintah yang membuat proses pengurusan izin menjadi rumit, kurangnya transparansi informasi mengenai

persyaratan izin, serta kurangnya efektivitas dalam sistem pelayanan perizinan yang membuat prosesnya menjadi lebih lambat dan rumit.

Akibat dari beban administrasi yang tinggi ini termasuk penurunan minat investor, peningkatan biaya investasi, dan penurunan daya saing Kota Semarang sebagai destinasi investasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Semarang perlu mengambil langkah-langkah konkret seperti menyederhanakan dan mengharmonisasi perizinan, meningkatkan transparansi informasi, dan meningkatkan efektivitas sistem pelayanan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membuka jalur yang lebih mudah dan menguntungkan bagi investor, meningkatkan daya saing kota ini sebagai tujuan investasi, serta mengurangi beban administratif yang menjadi hambatan utama dalam penanaman modal.

Berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa faktor yang menyebabkan beban administrasi dalam proses penanaman modal di Kota Semarang menjadi tinggi, yaitu:

1. Keterpecahan kewenangan

Kewenangan dalam pengurusan izin masih terpecah-pecah di antara berbagai instansi pemerintah, seperti pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan proses pengurusan izin menjadi lebih kompleks dan memakan waktu. Investor harus mengurus izin di berbagai instansi yang berbeda, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak.

2. Kurang transparannya informasi

Informasi mengenai persyaratan dan prosedur pengurusan izin masih kurang transparan. Investor seringkali kesulitan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai persyaratan dan prosedur pengurusan izin. Hal ini menyebabkan investor kesulitan untuk mempersiapkan dokumen dan persyaratan yang diperlukan.

3. Kurang efektifnya sistem pelayanan

Sistem pelayanan perizinan masih belum efektif. Proses pengurusan izin masih sering berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Investor seringkali harus bolak-balik ke instansi pemerintah untuk mengurus izin. Hal ini menyebabkan investor menjadi lelah dan frustrasi.

Beberapa faktor krusial memainkan peran utama dalam peningkatan beban administrasi dalam proses penanaman modal di Kota Semarang. Proses perizinan, terutama terkait dengan izin mendirikan bangunan (IMB), seringkali kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama, menjadikannya salah satu pemicu utama beban administrasi yang tinggi. Kurangnya koordinasi antarinstansi, khususnya antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan lembaga lainnya, menjadi kendala yang memperumit layanan serta berujung pada peningkatan beban administratif yang terasa. Ditambah lagi, kebijakan dan standar operasional perusahaan yang belum terstruktur atau belum terlaksana dengan baik dapat menambah beban administrasi. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan layanan perizinan juga menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi tingkat beban administrasi dalam penanaman modal di Kota Semarang. Keseluruhan faktor ini membutuhkan perhatian serius serta penanganan yang tepat guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penanaman modal.

Dalam konteks penanaman modal, peningkatan beban administrasi bisa menjadi hambatan serius bagi para pelaku investasi. Kompleksitas dalam proses perizinan, terutama yang terkait dengan IMB, mengakibatkan waktu yang terbuang dan biaya tambahan yang tidak terduga bagi para investor. Sementara itu, kurangnya koordinasi di antara instansi-instansi terkait menimbulkan hambatan dalam pengurusan perizinan, menambah kerumitan administratif. Kebijakan dan standar operasional yang belum terstruktur atau diterapkan dengan baik juga berkontribusi pada meningkatnya beban administrasi. Lebih jauh lagi, pemahaman yang kurang dari masyarakat terhadap proses perizinan menjadi pemicu tambahan yang mendorong tingkat beban administrasi menjadi tinggi. Dengan memperhatikan sejumlah faktor ini, perbaikan dalam mengelola proses penanaman modal perlu menjadi fokus guna mengurangi beban administrasi yang membebani investor.

Upaya Pemerintah dalam Menangani Permasalahan Investasi di Dinas Penanaman Modal Kota Semarang

Penanganan beban administrasi dalam proses penanaman modal di Kota Semarang membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Upaya untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta memperbaiki kebijakan dan operasional perusahaan menjadi langkah kunci dalam menangani kompleksitas administratif. Penyadaran masyarakat terhadap prosedur perizinan juga menjadi aspek penting untuk menurunkan tingkat beban administrasi yang ada. Kolaborasi dan kerjasama antara pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, menjadi krusial dalam merespon tantangan ini. Dengan langkah-langkah konkret dan sinergi antarinstansi, diharapkan dapat diciptakan lingkungan investasi yang lebih ramah dan efisien di Kota Semarang.

Beban administrasi yang tinggi dalam proses penanaman modal di Kota Semarang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain:

1. Menurunnya minat investor untuk menanamkan modal di Kota Semarang

Beban administrasi yang tinggi dapat menjadi faktor penghambat bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang. Investor akan mempertimbangkan kembali rencana investasinya jika beban administrasi yang harus dikeluarkannya terlalu tinggi. Hal ini karena beban administrasi yang tinggi dapat menyebabkan investor kehilangan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.

2. Meningkatnya biaya investasi

Beban administrasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya investasi yang harus dikeluarkan oleh investor. Investor harus mengeluarkan biaya untuk mengurus perizinan, biaya untuk legalisir dokumen, dan biaya lainnya. Hal ini dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh investor.

3. Menurunnya daya saing Kota Semarang sebagai tujuan investasi

Beban administrasi yang tinggi dapat menurunkan daya saing Kota Semarang sebagai tujuan investasi. Investor akan lebih memilih untuk menanamkan modalnya di daerah lain yang memiliki beban administrasi yang lebih rendah. Hal ini karena daerah lain yang memiliki beban administrasi yang lebih rendah akan lebih menarik bagi investor.

Dampak-dampak negatif tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Semarang perlu melakukan upaya-upaya untuk mengurangi beban administrasi dalam proses penanaman modal. Upaya-upaya tersebut dapat berupa:

- Melakukan simplifikasi dan harmonisasi perizinan: Pemerintah daerah perlu melakukan simplifikasi dan harmonisasi perizinan untuk mengurangi jumlah dan jenis perizinan yang diperlukan oleh investor.
- Meningkatkan transparansi informasi: Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi informasi mengenai persyaratan dan prosedur pengurusan izin.
- Meningkatkan efektivitas sistem pelayanan: Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas sistem pelayanan perizinan untuk mempercepat proses pengurusan izin.

Dampak beban administrasi yang tinggi dalam proses penanaman modal di Kota Semarang memberikan imbas yang signifikan, terutama terkait dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam mengurus perizinan. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu dapat menjadi penyebab penundaan dalam implementasi proyek, sehingga menimbulkan biaya tambahan bagi para investor. Kurangnya koordinasi antarinstansi juga berdampak serupa dengan memperlambat proses perizinan, yang pada akhirnya menghambat aliran investasi ke kota tersebut. Tidak hanya berdampak pada skala individu investor, namun hal ini juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Kota Semarang secara keseluruhan serta mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja.

Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan. Langkah-langkah konkret seperti penyederhanaan proses, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penerapan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan dapat membantu mengurangi beban administrasi. Efisiensi ini akan memberikan kepastian waktu kepada investor, mengurangi biaya tambahan yang tidak perlu, dan mendorong pertumbuhan investasi yang lebih cepat dan berkelanjutan di Kota Semarang.

Peningkatan efisiensi dalam proses perizinan bukan hanya tentang mempercepat aliran investasi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi para investor. Transparansi yang ditingkatkan dan proses yang lebih sederhana akan membuka pintu bagi investasi yang lebih banyak dan beragam di Kota Semarang, yang pada akhirnya dapat membantu menggerakkan roda ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Tingkat kompleksitas beban administrasi dalam proses penanaman modal di Kota Semarang menunjukkan tantangan yang substansial bagi investasi di wilayah tersebut. Faktor-faktor seperti proses perizinan yang rumit, kurangnya koordinasi antarinstansi, kebijakan yang belum optimal terimplementasi, serta

pemahaman masyarakat yang terbatas terhadap proses perijinan menjadi elemen krusial yang menghambat pertumbuhan investasi. Kompleksitas ini membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam upaya bersama untuk mengurangi beban administrasi. Langkah-langkah konkret seperti penyederhanaan proses perizinan, peningkatan koordinasi antarinstansi untuk mengurangi hambatan administratif, penerapan kebijakan yang lebih efektif, dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prosedur perijinan menjadi strategi utama dalam merespons tantangan ini.

Memperhatikan kompleksitas yang teridentifikasi, penanganan beban administrasi dalam investasi Kota Semarang harus menjadi fokus utama bagi pemangku kepentingan. Integrasi antara pemerintah daerah, walikota, instansi terkait, dan masyarakat dalam mengatasi beban administrasi menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Langkah-langkah koordinatif yang terencana dan terstruktur akan memberikan pijakan untuk menciptakan proses perizinan yang lebih lancar serta mereduksi kendala administratif yang membebani investor. Keselarasan kebijakan dan pemahaman yang lebih baik dari seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat infrastruktur investasi dan menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi kota.

Pengelolaan beban administrasi dalam proses investasi di Kota Semarang bukan hanya tentang mengurangi hambatan-hambatan administratif, tetapi juga tentang membuka pintu untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Langkah-langkah kolaboratif yang diarahkan untuk menyederhanakan proses, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat pemahaman bersama akan memberikan kontribusi signifikan dalam mengubah Kota Semarang menjadi destinasi investasi yang menarik dan bersaing secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Akni, Y, Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 138-153.
- Farah, S., & Astuti, R. S. (2020). Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(1), 69-79.
- HERMAWAN, S. (2018). *Analisis Proses Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences).
- Lutfiana, N., & Larasati, E. (2019). Inovasi Sistem Informasi Tenaga Kesehatan (SINAKES) Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 32-51.
- Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, 9(2), 5018-5032.

- Rutdatin, D., Astuti, P., & Herawati, N. R. (2017). Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberantasan Pungutan Liar Di Pelayanan Publik (Studi Kasus: Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 281-290.
- Sadewa, H., & Astuti, P. (2018). Analisis Proses Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(2), 281-290.
- Yuningsih, T., Larasati, E., & Sulandari, S. (2020). DIMENSI INOVASI SINAKES ONLINE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG. *Public Administration Journal of Research*, 2(1).
- Yuwono, T., & Manar, D. (2017). Analisis Pemerintahan Dalam Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Studi Kasus Di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 51-60.